

**STRATEGI HUMAS POLRES WONOGIRI**  
**(Deskriptif Kualitatif Devisi Humas Polres Wonogiri Dalam Memperbaiki**  
**Citra Polisi Terhadap Kasus Tertangkapnya Anggota Polres Wonogiri**  
**Memakai Narkoba)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I**  
**pada Jurusan Ilmi Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika**

**Oleh:**

**HESTI RAHMAWATI**

**L 100130120**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**  
**FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STRATEGI HUMAS POLRES WONOGIRI**

**(Deskriptif Kualitatif Devisi Humas Polres Wonogiri Dalam Memperbaiki Citra Polisi Terhadap  
Kasus Tertangkapnya Anggota Polres Wonogiri Memakai Narkoba)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

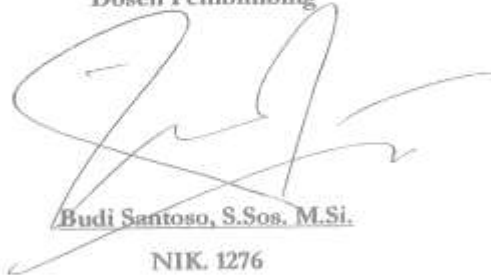
**Oleh**

**HESTI RAHMAWATI**

**L 100130120**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

**Dosen Pembimbing**



**Budi Santoso, S.Sos. M.Si.**

**NIK. 1276**

## HALAMAN PENGESAHAN

### STRATEGI HUMAS POLRES WONOGIRI

(Deskriptif Kualitatif Devisi Humas Polres Wonogiri Dalam Memperbaiki Citra Polisi Terhadap Kasus Tertangkapnya Anggota Polres Wonogiri Memakai Narkoba)

Oleh

HESTI RAHMAWATI

L. 100130120

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Komunikasi dan Informatika

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 21 Agustus 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Drs. Budi Santoso S.Sos, M.Si  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Agus Triyono, M.Si  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Dian Purworini, S.sos., MM  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan,  
  
(Nuziyanna, ST., M.Sc., Ph.D)  
NIK. 881

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Agustus 2018



HESTI RAHMAWATI  
L 100130120

**STRATEGI HUMAS POLRES WONOGIRI**  
**(Deskriptif Kualitatif Devisi Humas Polres Wonogiri Dalam Memperbaiki Citra Polisi Terhadap Kasus Tertangkapnya Anggota Polres Wonogiri Memakai Narkoba)**

**Abstrak**

Polres Wonogiri merupakan suatu lembaga kepolisian yang menangani tentang penegakan hukum. Humas Polres Wonogiri bertugas memberikan informasi kepada publik tentang kebijakan yang akan dan telah diambil oleh Polres Wonogiri dan menjalin hubungan yang baik dengan publiknya, terkait dengan pemulihan citra kepolisian setelah tertangkapnya dua anggota Polres Wonogiri yang memakai narkoba. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi humas Polres Wonogiri dalam memperbaiki citra Polisi terkait kasus anggota Kepolisian Resor Wonogiri yang memakai narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan studi pustaka. Pengambilan sampel dengan teknik "*purposive sampling*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pihak Humas Polres Wonogiri dalam memulihkan citra kepolisian di mata masyarakat, yaitu dengan jalan Pihak Polres Wonogiri memberikan sanksi hukuman berat, dalam hal ini yang bersangkutan (JK) disidangkan di Pengadilan Negeri dan divonis hukuman selama 1 tahun 8 bulan. Inisial IST karena tidak terbukti mengkonsumsi narkoba, dijatuhi hukuman penundaan pangkat selama setengah periode atau 6 bulan, dan selama itu berada dalam pengawasan. Ketegasan Polres Wonogiri terhadap anggotanya tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik maupun media *online* agar masyarakat mengetahuinya.

**Kata kunci:** Strategi Humas, dan Citra Polisi.

**Abstract**

The Wonogiri police station is a police institution that deals with law enforcement. Wonogiri Police Public Relations is tasked with providing information to the public about policies that will and have been taken by the Wonogiri Regional Police and establish good relations with the public, related to the recovery of the police image after the arrest of two Wonogiri police officers who used drugs. On this basis, this study aims to determine the public relations strategy of the Wonogiri District Police in improving the image of the Police in relation to cases of Wonogiri Resort Police officers who use drugs. This research is a qualitative descriptive study with data collection techniques used, namely in-depth interviews and literature studies. Sampling with "purposive sampling" technique. The results showed that the efforts made by the Wonogiri Police Public Relations in recovering the image of the police in the eyes of the public, namely by the way the Wonogiri Police Department sanctioned heavily, in this case the person concerned (JK) was tried in the District Court and sentenced to 1 year 8 months. IST initials for not being proven to take drugs, were sentenced to postponement of rank for half a period or 6 months, and during that time were under surveillance. The firmness of the Wonogiri police station against its members was informed to the public through various media, both print, electronic and online media so that the public would know about it.

**Keywords:** Public Relations Strategy, and Police Image

## 1. PENDAHULUAN

Era globalisasi seperti sekarang ini, aktifitas manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin derasnya arus informasi, menjadikan kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus yang bervariasi dan canggih, salah satunya di daerah Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Wonogiri juga memiliki banyak permasalahan diantaranya pembangunan desa yang tertinggal, permasalahan narkoba, miras, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Situasi dan kondisi tersebut yang menjadikan tantangan tersendiri bagi Polres Wonogiri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Kepolisian Resor Wonogiri atau disingkat dengan Polres Wonogiri adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Wonogiri. Polres Wonogiri saat ini dipimpin oleh AKBP Robertho Pardede, SIK., MIK. Sebagai alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan masyarakat di Kabupaten Wonogiri, Polres Wonogiri selalu berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat untuk mendeteksi dan mencegah sedini mungkin kejahatan hingga ke akar-akarnya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar tercipta kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Namun disisi lain, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap Polisi masih rendah, bahkan ketakutan masyarakat terhadap keberadaan anggota Polisi yang masih tinggi. Pemikiran tersebut akibat dari adanya stereotip yang melekat pada Polisi yang menonjolkan kekerasan dan kekuasaan daripada tindakan berdasarkan aturan hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia. Selain itu berkembangnya opini masyarakat mengenai kinerja Polisi saat ini yang dinilai masih kurang baik, dikarenakan masih banyaknya penyalahgunaan wewenang.

Seperti halnya yang terjadi pada hari Minggu, 30 Oktober 2016 lalu, dua oknum anggota Polres Wonogiri tertangkap tangan ikut dalam pesta sabu-sabu yang digelar di salah satu hotel kawasan Waduk Gajah Mungkur. Penggerebekan dilakukan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Wonogiri bersama Propam Polres Wonogiri untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Tim meluncur ke lokasi kejadian sekitar pukul 01.30 WIB. Setelah diintai, terindikasi ada aktivitas mencurigakan yang dilakukan lima orang. Tim gabungan yang dipimpin KBO Sat Narkoba Iptu Achmad Riedwan Prevoost dan Kasi Propam Iptu Supardi kemudian memaksa masuk ke salah satu kamar hotel. Kedatangan petugas yang tiba-tiba membuat kelima orang itu tak berkutik. Mereka yang

di dapati saat penggrebekan tersebut adalah NBS, 28, warga Giritirto, Wonogiri; DA, 38, warga Bulusulur, Wonogiri; S, 42, ibu rumah tangga warga Gandekan, Jebres, Solo. Selanjutnya Aiptu JK serta Bripka IS keduanya anggota Polres Wonogiri. Dan terkait keterlibatan dua oknum Polisi ini, Kapolres juga menegaskan bahwa pada keduanya akan ada sanksi berat. Setidaknya ada dua sanksi yaitu kode etik dan pidana. Dan untuk kode etik, bukan tidak mungkin akan memberhentikan mereka sebagai Polisi. Sebab apa yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran berat. (tribratanerws-polreswonogiri.com, Kamis 3 November 2016).

Kasus di atas merupakan salah satu dampak yang bisa mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polisi menurun, khususnya Polres Wonogiri. Hal tersebut menjadi tugas yang sangat berat bagi praktisi humas Polres Wonogiri dalam menyelesaikan masalah ini guna membentuk kembali citra positif Polisi. Memahami tentang hal tersebut, Polres Wonogiri berusaha keras dalam memperbaiki diri menuju Polisi yang bermoral, profesional, modern dan terpercaya. Polres Wonogiri telah melakukan pembenahan manajemen sumber daya manusia, khususnya pada aspek sikap dan perilaku anggota Polres, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial lainnya. Pentingnya Kode Etik Profesi bagi seorang anggota Polres, diharapkan harus benar-benar beroperasional mengatur tata kehidupan seseorang yang berprofesi sebagai anggota Kepolisian dan tidak hanya tertulis dan tersimpan rapi di kertas-kertas saja. Oleh karena itu, himbauan dan pengarahan serta penegakan Kode Etik Profesi yang ada, perlu dilakukan dengan tegas dan transparan, sehingga keberadaan Polres Wonogiri yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penanggung jawab keamanan dapat terwujud. Hal tersebut menjadi tugas seorang divisi Humas Polres Wonogiri dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Wonogiri.

Hubungan Masyarakat atau sering disebut dengan Humas merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu lembaga atau perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan dan sikap *stakeholder* terhadap lembaga atau perusahaan tersebut. Tujuan utama seorang humas yaitu untuk meningkatkan serta menjaga reputasi lembaga atau instansi. Seorang humas juga bertugas dalam membuat program-program dalam upaya mempertahankan, menciptakan dan memelihara pengertian bersama antara lembaga dengan *stakeholdernya*. Namun seringkali masyarakat beranggapan humas hanya memberikan informasi mengenai hal-hal yang baik saja dan cenderung menutupi hal-hal yang buruk, termasuk juga anggapan mengendalikan pers. Anggapan tersebut timbul karena kurang pahamnya masyarakat terhadap tugas dan fungsi humas. Seorang humas

perlu dalam mengembangkan citra melalui komunikasi dua arah dengan publiknya, untuk mencapai kepentingan bersama dan menghindari anggapan-anggapan buruk tentang humas sendiri. (Professional & Unived, 2016)

Pada hakekatnya, humas merupakan sebuah proses komunikasi antara organisasi dengan publiknya untuk menjalin hubungan yang baik agar tercipta citra serta tercapai tujuannya. Bagi suatu lembaga Kepolisian, citra merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh seorang praktisi humas. Menurut Frank Jefkins citra merupakan suatu kesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengertian seseorang tentang fakta-fakta atau kenyataan. Citra merupakan kesan seseorang atau individu tentang sesuatu hal yang muncul sebagai hasil pengetahuan dan pengalamannya. (Susanto, 2015)

Tertangkapnya dua orang anggota Polres Wonogiri yang memakai narkoba, merupakan tindakan yang mencoreng citra kepolisian. Sebagai penegak hukum, Polisi seharusnya menegakan hukum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat, tetapi dua Polisi anggota Polres Wonogiri ini justru bertindak yang melanggar hukum. Kalau permasalahan ini tidak segera diatasi, maka citra kepolisian, khususnya Polres Wonogiri akan tercoreng di mata masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan tindakan, sebagaimana penelitian Lianita, bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga Kepolisian dalam meningkatkan citra di mata masyarakat yaitu dengan menggunakan berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Dengan berbagai media tersebut, tindakan pihak Kepolisian dalam menegakan hukum bisa diketahui oleh masyarakat secara cepat. Hal ini berarti guna membangun citra Kepolisian perlu melakukan kerjasama dengan berbagai macam media, diantaranya menjalin kemitraan dan hubungan yang harmonis dengan media, memberikan pelayanan kepada media massa dalam hal berbagai informasi yang terkait dengan kinerja Kepolisian, dan membangun suatu hubungan kerjasama yang saling *simbiosis mutualisme* atau bersifat saling menguntungkan (Farleni dan Widayatmoko, 2014).

Dalam memahami media massa, penting juga bagi praktisi humas untuk mengetahui bagaimana cara kerja media. Cara kerja media disini bukan hanya sekedar bagaimana media massa memproduksi isi media massa seperti yang kita inginkan. Namun bagaimana produk media itu dipersepsi oleh publiknya mengingat bagaimana pentingnya fungsi media di dalam lembaga kepolisian (Iriantara, 2008:154).

Polres Wonogiri merupakan suatu lembaga kepolisian yang menangani tentang penegakan hukum. Humas Polres Wonogiri bertugas memberikan informasi kepada publik tentang kebijakan yang akan dan telah diambil oleh Polres Wonogiri dan menjalin



hubungan yang baik dengan publiknya, terkait dengan pemulihan citra kepolisian setelah tertangkapnya dua anggota Polres Wonogiri yang memakai narkoba. Salah satu langkah yang diambil humas Polres Wonogiri dalam rangka menyebarkan informasi kepada publik adalah menggunakan media massa. Peranan media massa pada saat ini sangat kuat dalam menyebarkan informasi ke masyarakat. Banyak instansi/perusahaan yang memanfaatkan media massa sebagai alat untuk menyebarkan kebijakan-kebijakan informasi sebuah instansi.

Perananan humas dan protokol Polres Wonogiri sangat diperlukan untuk mengatasi masalah jika terjadi suatu konflik, maka humas berusaha membendung opini negatif di masyarakat serta perlunya rasa keterbukaan antara masyarakat dengan humas. Dengan demikian, diperlukan manajemen serta strategi-strategi yang sudah terencana sebelumnya. Membangun sebuah kepercayaan dan opini positif di dalam masyarakat dibutuhkan usaha-usaha yang sudah terencana, karena lembaga kepolisian saat ini mendapatkan tuntutan-tuntutan dari masyarakat luas agar memberi perubahan yang lebih baik lagi.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti jabarkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah tentang bagaimana strategi humas Polres Wonogiri dalam memperbaiki citra Polisi berkaitan dengan kasus tertangkapnya anggota Polres Wonogiri yang tertangkap memakai narkoba. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi humas Polres Wonogiri dalam memperbaiki citra Polisi terkait dengan kasus tertangkapnya anggota Kepolisian Resor Wonogiri yang memakai narkoba.

### **3. METODE**

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan analisis data yang cermat terhadap suatu fenomena sosial tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat sekedar mengungkap fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan untuk memberikan gambaran obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti (Moleong, 1994: 3). Lokasi penelitian di kantor Polres Wonogiri. Jenis data yang peneliti gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan atau narasumber melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan Strategi Devisi Humas Polres Wonogiri Dalam Memperbaiki Citra Polisi Terhadap Kasus Tertangkapnya Anggota Polres Wonogiri Memakai Narkoba

Pada Tahun 2016. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dengan mengutip serta mengumpulkan keterangan-keterangan dari sumber lain seperti artikel, buku-buku, dan sumber-sumber dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap narasumber. Teknik wawancara ini tidak dilakukan dengan formal dan struktur yang ketat, agar informasi yang dikumpulkan lebih mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) dengan nara sumber atau informan. Data penelitian ini juga diperoleh melalui penggalian pustaka berupa dokumen yang pernah ada maupun yang pernah diterbitkan. Dokumentasi yang dimaksudkan meliputi: surat penangkapan, kesimpulan-kesimpulan penemuan dan laporan tertulis lainnya, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik "*purposive sampling*", yaitu dalam mencari informasi peneliti memilih narasumber atau informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya dalam memberikan keterangan dan informasi mengenai strategi Humas Polres Wonogiri dalam memulihkan nama kepolisian terkait dengan tertangkapnya anggota Polres Wonogiri yang memakai narkoba pada tahun 2016, sehingga dapat diketahui informasi dan masalah secara detail.

Penggunaan teknik *purposive sampling* ini dirasa akan lebih efektif, karena melalui teknik ini peneliti langsung mendapatkan data yang dibutuhkan sehingga mengurangi jumlah data yang tidak relevan. Oleh karena itu, peneliti menunjuk Humas Polres Wonogiri dan anggota Polres Wonogiri yang melakukan penangkapan terhadap dua Polisi yang memakai Narkoba, serta pihak yang mengetahui kasus tertangkapnya anggota Polres Wonogiri memakai Narkoba. Dalam penelitian ini yang menjadi informan, antara lain: 1) Iptu Supardi, beliau adalah ketua seksi PROPAM Polres Wonogiri; dan 2) Kasubbag Humas Bagops Polres Wonogiri AKP Hariyanto.

Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data dilakukan agar data bisa disajikan dengan baik. Seluruh data yang didapat kemudian diolah dengan cara tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman (Yustian, 2008) secara pengertian tahapan analisis data dijabarkan sebagai berikut, yang pertama reduksi data, proses pengolahan data informan melalui pertanyaan dan perumusan masalah dalam penelitian. Kedua penyajian data, proses memindai data penelitian ke dalam bentuk narasi atau teks

agar memudahkan proses analisis data, sesuai dengan kategori atau kode yang sudah dibuat untuk diorganisasikan dan kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah yang ada. Ketiga penarikan kesimpulan, proses menyusun hasil jawaban dari penelitian yang nantinya dilanjutkan dengan proses penarikan kesimpulan dilakukan atas sumber yang didapat dalam mendapatkan data saat melakukan pengambilan data wawancara di lapangan.

Langkah berikutnya setelah peneliti melakukan pengumpulan data dan analisis data yaitu melakukan uji validitas data dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah upaya memeriksa kebenaran informasi yang diberikan oleh informan melalui proses wawancara (Nasution dalam Wulandari, 2013). Validitas data penelitian ini menggunakan triangulasi teori dan triangulasi data. Artinya peneliti dalam menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan data hasil penelitian dengan teori yang digunakan dan juga membandingkan dengan data-data yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi dengan data wawancara. Data dipilih yang sesuai dengan focus penelitian, lalu dilakukan interpretasi data atau pemaknaan. Interpretasi data perlu dibandingkan dengan konteks-konteks sosial dan masyarakat, serta lingkungan yang melatarbelakangi strategi humas Polres Wonogiri dalam memulihkan nama baik di masyarakat (Sugiyono, 2014).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tertangkapnya Anggota Polres Wonogori**

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan penulis dari Ketua Seksi PROPAM, Bapak Supardi, menjelaskan bahwa memang ada dua anggota polres Wonogiri yang ada di TKP. Namun setelah dicek *urine* hanya salah satu yang kedapatan positif menggunakan narkoba, dengan barang bukti plastik bekas pembungkus narkoba itu di salah satu pelaku (JK). Sedangkan (IST) setelah dicek *urine* hasilnya negatif. Namun keduanya tetap dijerat hukuman. (IST) dijerat pelanggaran disiplin karna dia ada di lokasi itu tanpa memberitahukan kepada pimpinan. Sedangkan (JK) dijerat dengan pidana dan ditangani oleh Reserse Narkoba. Jadi JK terlibat secara langsung, sedangkan IST tidak. Keduanya bertugas di Polres Wonogiri, dan menjabat di anggota Sabhara.

Sebelumnya sudah ada kecurigaan terhadap kedua anggota tersebut dan pernah Kasi Propam ingatkan untuk tidak bermain dengan masalah narkoba. Namun demikian, pihak Kasi Propam tidak tahu, apa kegiatan kedua anggota tersebut saat diluar jam dinas, berbeda saat jam dinas, kasi Propam bisa mengawasi anggota secara langsung.

Perilaku JK sehari-hari pada saat dinas tidak terlihat dia pengguna narkoba. Hanya saja yang bersangkutan mempunyai penyakit diabetes. Di kakinya sudah keluar seperti

cairan, sehingga hanya dipantau kesehariannya karena penyakitnya. Setelah ada informasi dan penangkapan malam itu, dan kasi Propam turun langsung ke TKP, diketahui keduanya ada dilokasi, namun setelah dilakukan cek *urine* ternyata yang kedapatan hanya satu.

Kronologi penangkapan terhadap dua anggota Polres Wonogiri oleh Reserse Narkoba, didasarkan atas adanya informasi dari masyarakat kalau di hotel daerah Waduk Gajah Mungkur telah ada pesta sabu. Atas informasi tersebut, kemudia Tim Satuan Propam dan Satuan Narkoba segera menindaklanjuti informasi tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Iptu Supardi selaku Kasi Propam, sebagai berikut:

“Jadi pada saat malam itu ada informasi dari masyarakat kalau di hotel daerah waduk gajah mungkur itu digunakan untuk pesta sabu-sabu yang melibatkan oknum. Setelah itu tim dari sat narkoba, menginformasikan kepada sat propam. Tim sat propam yang bergabung dengan sat narkoba langsung ke lokasi. Kita mengintai beberapa waktu, ternyata setelah orang-orang pada kumpul didalam, kita masuk dan kita dobrak memang ada dua dan ada beberapa orang umum atau sipil, namun saya fokuskan pada anggota dan saat itu juga langsung di bawa ke polres kita introgasi di polres, setelah itu kita cek urine yang kedapatan positif 1.”

Keterlibatan anggota Polres Wonogiri (JK) ikut memakai narkoba, didasarkan karena ikut ajakan temannya. Sebagaimana pendapat Supardi, bahwa alasannya JK hanya diajak oleh temannya, namun walaupun dia anggota polri namun hidupnya hanya sederhana. Jadi dia dengan istrinya bercerai, dan dia hidup sendiri sedangkan anak-anaknya ikut ibunya. Dengan dia hidup sendiri dan kondisinya sakit, dia diajak temennya dan ternyata diajak untuk mengkonsumsi narkoba pada malam itu, dan akhirnya dia tertangkap.

Sementara alasan IST anggota Polres Wonogiri yang ikut tertangkap, yaitu IST dan JK pada saat penjagaan satu regu, dan ikut ajakan teman JK, tetapi IST tidak tahu kalau mau melakukan pesta sabu. Hal ini sebagaimana pendapat Iptu Supardi, bahwa “alasan IST ada di lokasi karena antara IST dan JK pada saat dipenjagaan itu satu regu, dan pada saat dia diajak, dia ikut dan dia tidak tau jika diajak seperti itu.”

Setelah dilakukan penangkapan terhadap kedua anggota Polres Wonogiri, kemudian kedua anggota Polres Wonogiri tersebut diberikan atau dijatuhi hukuman disiplin. Nasib IST karena tidak terbukti mengkonsumsi narkoba, dijatuhi hukuman penundaan pangkat selama setengah periode atau 6 bulan, dan selama itu juga dia berada dalam pengawasan. Sementara untuk nasih inisial JK karena terbukti mengkonsumsi narkoba, dijatuhi hukuman selama 1 tahun 8 bulan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Iptu Supardi selaku Kasi Propam, sebagai berikut:

“IST setelah ada kejadian itu kita lakukan sidak disiplin, dan sudah dijatuhi hukuman disiplin. Dan dia menjalani penempatan di tempat khusus selama 21 hari, penempatan

di sel Polres. Hukuman disiplin disini secara otomatis akan ada penundaan pangkat selama setengah periode / 6 bulan, dan selama itu juga dia berada dalam pengawasan. Sedangkan si JK, karna pelanggarannya termasuk dalam ranah pidana sehingga yang memproses dari Sat. Reserse Narkoba. Yang bersangkutan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri dan sudah divonis hukuman selama 1 tahun 8 bulan. Dan saat ini sudah bebas. Namun dengan kebebasan yang bersangkutan tidak menghentikan proses berikutnya yaitu penyelidikan kode etik yang saya lakukan. Setelah kita lakukan audit investigasi dari auditor polres yang saya pimpin langsung dengan anggota kita proses untuk kasus keterlibatan kepemilikan narkoba. Ancaman dari proses tersebut adalah pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dan sekarang masih dalam proses.”

### **3.2 Upaya Mengantisipasi Timbulnya Permasalahan Serupa pada Anggota yang Lain**

Kasus tertangkapnya dua anggot Polres Wonogiri yang memakai narkoba, menjadikan bumerang merusak citra kepolisian di mata masyarakat. Atas adanya kejadian tersebut dapat dijadikan pengalaman bagi pihak kepolisian khususnya Polres Wonogiri untuk menjaga agar dikemudian hari tidak ada lagi anggota kepolisian yang melakukan tindakan serupa, atau tindakan lain yang melanggar hukum. Oleh karenanya pihak Polres Wonogiri berupaya dengan bertindak lebih tegas terhadap anggota Polres Wonogiri yang melakukan tindak pidana khususnya mengkonsumsi narkoba, dengan tidak segan-segan memberikan ancaman berupa PDTH. Upaya tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Iptu Supardi, sebagai berikut:

“Saya mendasari perintah dari presiden melalui Bapak Kapolri, Kapolda hingga Kapolres jadi ada aturan yang dibakukan pimpinan bahwa anggota yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan narkoba bisa diproses sesuai kode etik dengan ancaman PDTH. Hal tersebut bisa memberikan efek jera pada anggota yang lain. Sehingga anggota lain bisa berfikir agar tidak terlibat dengan kasus narkoba seperti ini.”

Selain pelanggaran berupa pemakaian narkoba yang dilakukan oleh anggota Polres Wonogiri, ada juga pelanggaran yang lain. Pelanggaran-pelanggaran lain tersebut adalah pelanggaran yang sifatnya pelanggaran kecil, seperti tidak masuk dinas. Namun demikian Pihak Polres Wonogiri tetap memberikan sanksi dan diberikan pembinaan agar pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun tidak dilakukan oleh anggota Polres Wonogiri. Hal ini sebagaimana pendapat dari Supardi, yang menyatakan bahwa:

“Pelanggaran lain pasti ada, namun hanya pelanggaran-pelanggaran kecil misalnya tidak masuk dinas. Bagi saya ini hal wajar, di instansi manapun pasti ada kasus-kasus seperti ini. upaya kami dalam menangani pelanggaran-pelanggaran seperti itu yaitu dengan memanggil keluarganya, kita tanyakan ada permasalahan apa, mungkin ada ketidakharmonisan di keluarga, sehingga dia tidak masuk dinas. Atau mungkin ada

alasan-alasan lain. Kemudian setelah kita panggil keluarganya dan menjalani hukuman, akan dilaksanakan pembinaan rohani atau juga disebut dengan pembinaan ulang profesi dengan tujuan mengingatkan kembali kepada anggota bahwa perbuatannya itu melanggar dan ada sanksinya.”

### **3.3 Strategi Memperbaiki Citra Kepolisian**

Fungsi polisi tumbuh dan berkembang semakin jelas manakala ancaman terhadap suatu kelompok semakin nyata. Ancaman itu tidak hanya berupa bahaya yang datang dari luar kelompok itu, tetapi juga berupa ancaman yang ada didalam kelompok itu sendiri maupun ancaman dari luar kelompoknya. Kehidupan akan senantiasa melahirkan pergulatan hebat, dimana manusia yang kuat pada kelompoknya selalu bertindak sebagai pimpinan untuk melawan musuh dan melindungi kelompok lainnya. Tindakan manusia kuat itulah wujud dari fungsi polisi yang paling sederhana. Namun demikian, dalam perkembangannya, Polri (Polisi Republik Indonesia), yang memegang kuasa penuh atas hal tersebut bukan saja menjadi sosok bak pelindung namun juga kerap sebagai momok yang menakutkan bagi orang-orang yang tak bersalah atau melanggar hukum. Seiring berkembangnya dan beranekaragamnya akan dinamika kehidupan, baik di sisi sosial, ekonomi dan politik. Polri menjadi momok yang menakutkan. Bukan dikarenakan mereka memiliki senjata yang kapan saja siap disodorkan ke semua pihak jika melanggar hukum, tapi juga karena moral dan etika dasar polisi sudah luntur di institusi besar ini.

Tidak perlu jauh-jauh kita melihat bagaimana etika dan moral seorang polisi anggota Polres Wonogiri yang ikut pesta sabu di hotel area waduk Gajah Mungkur pada tahun 2016. Hal ini menjadikan pandangan masyarakat terhadap kinerja Polisi di Polres Wonogiri terdapat berbagai penilaian negatif dari masyarakat. Polisi harusnya menjadi contoh untuk masyarakat, kalau polisi saja memakai narkoba, bagaimana masyarakatnya tidak memakai barang haram tersebut. Soalnya ada deking untuk mengeluarkannya ketika anggota polisi tertangkap. Bila masyarakat sipil yang memakai narkoba, polisi selalu memburunya habis-habis, kalau polisi yang memakai barang haram tersebut, tenang-tenang saja, toh dia kalau tertangkap bisa lepas lagi, dan kalau polisi memakai barang haram tersebut, rahasianya lebih aman dari pada masyarakat sipil. Atas dasar hal tersebut, menjadikan baik buruknya citra Polres Wonogiri juga tergantung dari sikap masyarakat, bersikap apatis, reaktif, kritis atau telah puas atas kinerja Polres Wonogiri selama ini.

Polisi yang berkarakter terpuji yang dapat menempatkan diri sebagai seorang moralis, bapak, teman, pengabdian, dan tokoh yang dikagumi dan dihormati. Artinya, kemulyaan martabat dan kehormatan anggota Polri dapat dilihat dari besarnya penghargaan dan pengakuan masyarakat terhadap profesinya. Penghargaan yang sesungguhnya tercermin

dalam realitas perilaku pengabdian dan pelaksanaan tugasnya yang membawa manfaat bagi masyarakat, bahkan ditempatkan secara terhormat di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah Polres Wonogori bertindak adil dan tegas terhadap semua lapisan masyarakat yang bertindak melanggar hukum. Ketegasan Polres Wonogiri ditunjukkan dengan menangkap dan menjatuhkan sanksi terhadap dua anggotanya yang tertangkap melakukan pesta narkoba, yaitu IST dan JK. IST karena tidak terbukti mengkonsumsi narkoba, dijatuhi hukuman penundaan pangkat selama setengah periode atau 6 bulan, dan selama itu juga dia berada dalam pengawasan. Sementara untuk inisial JK dijatuhi hukuman selama 1 tahun 8 bulan, karena terbukti mengkonsumsi narkoba.

Ketegasan Polres Wonogiri terhadap anggotanya yang melanggar hukum, sebagai wujud strategi Humas Polres Wonogiri dalam memperbaiki citra Polri. Selain itu pihak Humas Polres Wonogiri menerapkan Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya). *Pertama*, professional. Dalam melaksanakan kepolisian sehari-hari, setiap anggota Polri harus berpedoman pada Tri Brata yaitu: Kami Polisi Indonesia: 1) berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 3) senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Catur Prasetya, yaitu sebagai insan Bhayangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat bangsa dan Negara untuk: 1) meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, 2) menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, 3) menjamin kepastian berdasarkan hukum, 4) memelihara perasaan tentram dan damai.

Selain itu, langkah yang dilakukan pihak Humas Polres Wonogiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasubbag Humas Bagops Polres Wonogiri, yaitu senantiasa menyampaikan informasi ke publik dan kedalam tubuh Polril, melakukan koordinasi dan pembinaan teknis tentang kehumasan tiga bulan sekali, menyelenggarakan pengelolaan dan informasi baik di lingkungan Polri maupun masyarakat, termasuk kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya dalam rangka membentuk opini masyarakat bagi kepentingan, melaksanakan jumpa pers, mengundang dan mengandalikan wartawan dalam jumpa pers, membangun kemitraan dengan wartawan media cetak, media elektronik, media *online* dan LSM, mengklarifikasi berita bila tidak benar, menyelesaikan sengketa informasi, melakukan dialog interaktif baik di TV maupun di radio-radio, dan mengelola website kesatuan.

*Kedua*, modern. Setiap anggota Polres Wonogiri dalam rangka melaksanakan tugas menggunakan peralatan sarana prasarana yang modern, antara lain computer, internet, kamera, hp dan lain-lain. *Ketiga*, terpercaya. Dalam hal ini, pihak Polres Wonogiri memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan ramah, cepat, murah, menyenangkan agar dipercaya oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat, dihargai oleh masyarakat sehingga meningkatkan citra Polri. Polres Wonogiri juga memberikan *reward* atau penghargaan kepada anggota Polres yang berprestasi dan *punishmen* atau hukuman kepada anggota Polres yang melanggar peraturan. Dalam setiap permasalahan yang terjadi pada anggotanya baik itu positif atau negatif, Polres Wonogiri berusaha untuk terbuka dengan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polisi. Seperti pada permasalahan yang terjadi di Polres Wonogiri berkaitan dengan kasus tertangkapnya oknum polisi pesta sabu, humas Polres Wonogiri yang disetujui oleh Kapolres Wonogiri menerbitkan berita tentang kasus tersebut. Polres Wonogiri berusaha mencegah adanya anggapan buruk masyarakat terhadap Polri. Berita-berita yang berhubungan tentang Polres Wonogiri diterbitkan langsung di laman resmi Polri [www.humas.polri.go.id](http://www.humas.polri.go.id) dan juga sosial media resmi di instagram polres\_wonogiri (Kasubbag Humas Bagops Polres Wonogiri, 2018).

#### **4. PENUTUP**

Kasus dua oknum anggota Polres Wonogiri yang melakukan pesta narkoba di salah satu hotel area waduk Gajah Mungkur tahun 2016 membuat citra kepolisian khususnya Polres Wonogiri di mata masyarakat menjadi jelek. Upaya yang dilakukan pihak Humas Polres Wonogiri dalam memulihkan citra kepolisian di mata masyarakat, yaitu dengan jalan Pihak Polres Wonogiri memberikan sanksi hukuman berat, dalam hal ini yang bersangkutan (JK) disidangkan di Pengadilan Negeri dan divonis hukuman selama 1 tahun 8 bulan. Sementara inisial IST karena tidak terbukti mengkonsumsi narkoba, dijatuhi hukuman penundaan pangkat selama setengah periode atau 6 bulan, dan selama itu juga berada dalam pengawasan. Ketegasan Polres Wonogiri terhadap anggotanya tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik maupun media *online*. Kasubbag Humas Bagops Polres Wonogiri senantiasa menyampaikan informasi ke publik dan kedalam tubuh Polril, melakukan koordinasi dan pembinaan teknis tentang kehumasan tiga bulan sekali, menyelenggarakan pengelolaan dan informasi baik di lingkungan Polri maupun masyarakat, termasuk kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya dalam rangka membentuk opini masyarakat bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri, melaksanakan jumpa pers,



mengundang dan mengendalikan wartawan dalam jumpa pers, membangun kemitraan dengan wartawan media cetak, media elektronik, media *online* dan LSM, mengklarifikasi berita bila tidak benar, menyelesaikan sengketa informasi, melakukan dialog interaktif baik di TV maupun di radio-radio, dan mengelola website kesatuan.

## PERSANTUNAN

Jurnal publikasi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penelitian, diantaranya kepada

1. Bapak Budi Santoso, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing.
2. IPTU Supardi dan AKP Hariyanto, selaku informan peneliti.
3. Orang Tua peneliti yang telah memberikan dukungan spiritual dan financial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Çakmak, V., Aktan, E., Mert, M., & Köse, A. (2015). The formation of knowledge and its active utilization in practices of public relations in organisations. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 174, 2647–2652. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.947>
- Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2010). *The Handbook of Crisis Communication*. United Kingdom: John Wiley & Sons.
- Fischer, D., Posegga, O., & Fischbach, K. (2016). COMMUNICATION BARRIERS IN CRISIS MANAGEMENT : A LITERATURE REVIEW.
- Holtzhausen, D. R., & Roberts, G. F. (2009). An Investigation into the Role of Image Repair Theory in Strategic Conflict Management.
- Khotimah, N. H. (2015). Strategi Media Relations Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Mendapatkan Citra Positif. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Kriyantono, R. (2015). *PUBLIC RELATIONS, ISSUE & CRISIS MANAGEMENT*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kriyantono, R. (2015). *PUBLIC RELATIONS, ISSUE & CRISIS MANAGEMENT*. Prenadamedia Group.
- Lianita, C. A. (2014). *Strategi Public Relations Dalam Meningkatkan Citra Positif Desa Wisata*. Institut Pertanian Bogor
- Lu, J., Yang, N., Ye, J., Zou, L., & Mahmood, N. (2016). RESTORATION ON CONSUMER TRUST IN CRISIS EVENTS : The Impact of Corporate Strategies for Image Restoration on Consumer Trust in Crisis Events : The Moderating Role of Prosocial Motivation, 3410.
- Mulyana, D. (2000). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Rosda, 69
- Nizah, S., Tazin, M., & Yaakop, S. H. (2015). Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies Strategic Management of Public Relations in Slope Development : Case study in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 168, 302–310. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.235>
- Petrovici, A. (2014). Public Relations in Tourism . A Research on The Perception of The Romanian Public Upon Responsible Tourism. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 163, 67–72. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.287>

- Purnamasari, R. I. I. (2007). Peran humas polri dalam meningkatkan citra kepolisian.  
Universitas Mercu Buana
- Radu, R., & Ramona, R. (2014). Communication Styles of Leadership Tools, *149*, 813–818.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.326>
- Rumanti, Sr. M. A. (2002). *Dasar-Dasar Public Relations Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo
- Saunders, J. (n.d.). Crisis Communications and Media Coverage Before, During, and After a Natural Disaster, (October 2016).
- Tam, L. (n.d.). Organisational Crises in the Media : Crisis Response Strategies and News Coverage, *17*(1), 78–90.
- Telang, A., & Deshpande, A. (2016). Keep calm and carry on: A crisis communication study of Cadbury and McDonalds. *Management and Marketing*, *11*(1), 371–379.  
<https://doi.org/10.1515/mmcks-2016-0003>
- Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia